

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROPINSI DKI JAKARTA

Guna menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu diketengahkan visi dan misi Propinsi DKI Jakarta. Dengan makin memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah maupun warga Jakarta untuk bersama membangun kotanya. Di sisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan).

3.1. VISI

“Terwujudnya Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jakarta sebagai ibukota negara dan kota perdagangan dan jasa hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
- b. Jakarta hendaknya dihuni warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya.
- c. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

3.2. MISI

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau.

2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota.
5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik.

Pemahaman terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.
- b. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c. Menegakan supremasi hukum, keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif.
- d. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
- e. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistim informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.